PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LPT 2022

KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR
Jl. Kakum No. 19 Telp. (0271) 7889165
E-mail: jumantonokec@gmail.com Kode Pos : 57782

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Tahun 2022 telah disusun. Laporan Pelaksanaan Tugas Camat ini merupakan perwujudan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktual pada Kecamatan di Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (3).

Kami menyadari bahwa masih adanya berbagai kekurangan dalam Laporan ini dan adanya Program Kerja yang belum sepenuhnya tercapai secara optimal, maka guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka kami mengharapkan adanya saran, masukan yang konstruksif guna peningkatan kinerja instansi Kecamatan Jumantono..

Selanjutnya kami berharap kiranya Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jumantono Tahun 2022 yang kami susun ini bermanfaat dan berguna bagi instansi Kecamatan Jumantono dan terlebih lagi bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jumantono.

Jumantono, 16 Januari 2023
Camat Jumanto

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMANTONO

SUGIHARJO, S.IP,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19711108 199203 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…….....i
Daftar Isi…….....ii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. LATAR BELAKANG..... 1
B. DASAR HUKUM.....2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....2
BAB II DISKRIPSI UNIT KERJA 4
A.TUGAS DAN FUNGSI 4
B.JUMLAH PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN OLEH OPD.....5
C. STANDARD OPENING PROSEDURE.....6
D. PERDA /PERBUB YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....7
E. STRUKTUR ORGANISASI (BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SESUAI PERDA SOT)..... 7
F. KEPEGAWAIAN BERDASARKAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN.....8
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 12
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 17
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....18
BAB VII PENUTUP.....19

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Daerah mempunyai Kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Desentralisasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam atas barang dan jasa publik sesuai dengan kekhususan wilayahnya (I Made Suwandi dalam Reformasi Pemerintah Daerah 2004:B).

Dengan adanya kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan segala kekuatan yang ada berupaya menggali potensi dan sumber daya untuk dapat menutup berbagai kelemahan yang ada. Juga berupaya mencari celah / peluang dalam rangka meningkatkan pembangunan di segala bidang dengan berusaha memperkecil hambatan yang ada.

Dalam rangka mempercepat laju pembangunan di wilayah Kecamatan Jumantono memprioritaskan 3 (tiga) bidang pembangunan, yaitu Bidang Industri, Bidang Pertanian dan Bidang Pariwisata. Melalui prioritas 3 (tiga) bidang tersebut diharapkan akan dapat membawa kemajuan bidang-bidang yang lain seperti : Bidang Ekonomi, Keamanan, Ketertiban, Sosial dan Budaya, bahkan kondisi politik masyarakat. Sehingga tujuan utama pembangunan yaitu : Kesejahteraan Masyarakat secara adil dan merata dapat segera terwujud.

Camat sebagai salah satu perangkat daerah bertugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan sesuai dengan Kewenangan yang telah dilimpahkan. Disamping menjalankan fungsi Desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Camat juga melaksanakan tugas-tugas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Camat adalah Pendekatan Efisiensi dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan personil, dana dan peralatan yang dimiliki. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di Wilayah

Kabupaten dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam Pelaksanaan tugasnya mendapatkan pelimpahan sebagian wewenang Bupati / Walikota untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah. Selain tugas sebagaimana diatas, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi :

a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
f. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Desa;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau kelurahan.

Untuk menjalankan berbagai tugas sebagaimana diatas, Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk mewujudkan Pertanggungjawaban itulah Laporan Pelaksanaan Tugas Camat ini dibuat agar dapat diketahui berbagai keberhasilan dan Kegagalan Camat sebagai Kepala Unit Kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. DASAR HUKUM :

Laporan Pelaksanaan Tugas Camat ini dibuat berdasarkan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945
3. Landasan Struktural : Undang – undang No. 22 Tahun 1999
4. Landasan Operasional :
   a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Keja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
   c. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar sebagimana tersebut dalam pasal 3 ayat (3).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pelaksanaan Tugas Camat JumantonoTahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui capaian Program Kerja dan kegiatan SKPD yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022, serta sejauh mana Tingkat Keberhasilan dalam melakanakan tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
2. Untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan OPD yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
3. Sebagai bahan dan sumber Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Karanganyar.

BAB II
DESKRIPSI OPD

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Institusi Kecamatan :
   a. Melaksanakan tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan
   b. Melaksanakan fungsinya yaitu :
      1. Penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum
      2. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum
      3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Tugas Pokok dan Fungsi tiap bidang/seksi antara lain :
   a. Bidang Sekretariat :
      1. Peningkatan Pelayanan Teknis Administrasi kepada seluruh Organisasi Kecamatan
      2. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan
      3. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
      4. Peningkatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Peralatan barang inventaris dan perlengkapan
   b. Bidang Pemerintahan :
      1. Peningkatan kinerja pemerintahan Desa dalam menangani administrasi pemerintahan Desa.
      2. Memantapkan terbentuknya lembaga Desa dan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya
      3. Memadukan dan mensinkronisasikan tugas yang akan dilaksanakan oleh masing - masing Instansi Pemerintah
      4. Peningkatan ketrampilan perangkat kelurahan
      5. Peningkatan kinerja bagi Bendaharawan Kelurahan.
      6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan KTP dan KK.

c. Bidang Pembangunan :

1. Pemantapan perencanaan pembangunan Desa
2. Peningkatan efektifitas penggunaan dana pembangunan Desa
3. Peningkatan prakasa serta swadaya masyarakat dalam pembangunan
4. Pengembangan potensi penunjang pariwisata
5. Peningkatan tertib pembagian air dan pemanfaatannya

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menangani penyakit sosial dilingkungan
2. Peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam

e. Bidang Kesejahteraan Sosial :

1. Peningkatan kepedulian warga masyarakat terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya
2. Peningkatan peran serta lembaga kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam menangani penyakit sosial
3. Peningkatan mutu gizi makanan bagi keluarga dan sarana kesehatan masyarakat
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kehidupan beragama pendidikan dan kebudayaan

f. Bidang Pelayanan Umum :

1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan pemukiman yang bersih, indah dan serasi
2. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam mencari legalisasi surat keterangan
3. Peningkatan kelancaran pelaksanaan rapat dan upacara serta protokoler
4. Penertiban kelancaran kekayaan Desa / eks bondo deso dan kebersihan, keindahan, pertamanan serta sarana dan prasarana umum

B. JUMLAH PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN

NO	PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN	KETERANGAN
	N I H I L	

C. STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) OPD

Standar Operating Procedure (SOP) di Kecamatan Jumantono terdiri dari 18 jenis SOP, anatara lain sebagai berikut:

No.	Nama SOP	Unit Pengampu SOP
1.	Pengajuan SK	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Pengajuan KP	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	Pengajuan SPM-GU/TU	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Pembuatan RKA	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
5.	Pengajuan SPP dan SPM	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
6.	Pembuatan DPA	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.	Pembuatan Kartu Keluarga	Kasi Pemerintahan
8.	Pembuatan Kartu Penduduk	Kasi Pemerintahan
9.	Perijinan IUMK	Kasi Pelayanan Umum
10.	Perijinan SIUP	Kasi Pelayanan Umum
11.	Administrasi Legalisasi Surat Pengantar Nikah	Kasi Kesos
12.	Administrasi Dispensasi Nikah	Kasi Kesos
13.	Pengajuan Proposal Masjid	Kasi Kesos
14.	Musrenbang	Kasi PMD
15.	Pembinaan Linmas	Kasi Trantib
16.	Pembinaan Wilayah	Kasi Trantib
17.	Pelaksanaan Piket Kantor Kecamatan	Kasi Trantib
18..	Administrasi Legalisasi Surat Pengantar SKCK dan Ijin Keramaian Kecamatan Jumantono	Kasi Trantib
JUMLAH SOP		18

D. PERDA/PERBUP YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PERDA/PERBUP YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009	Tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Desa

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Jumantono sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JUMANTONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN JUMANTONO.
KABUPATEN KARANGANYAR

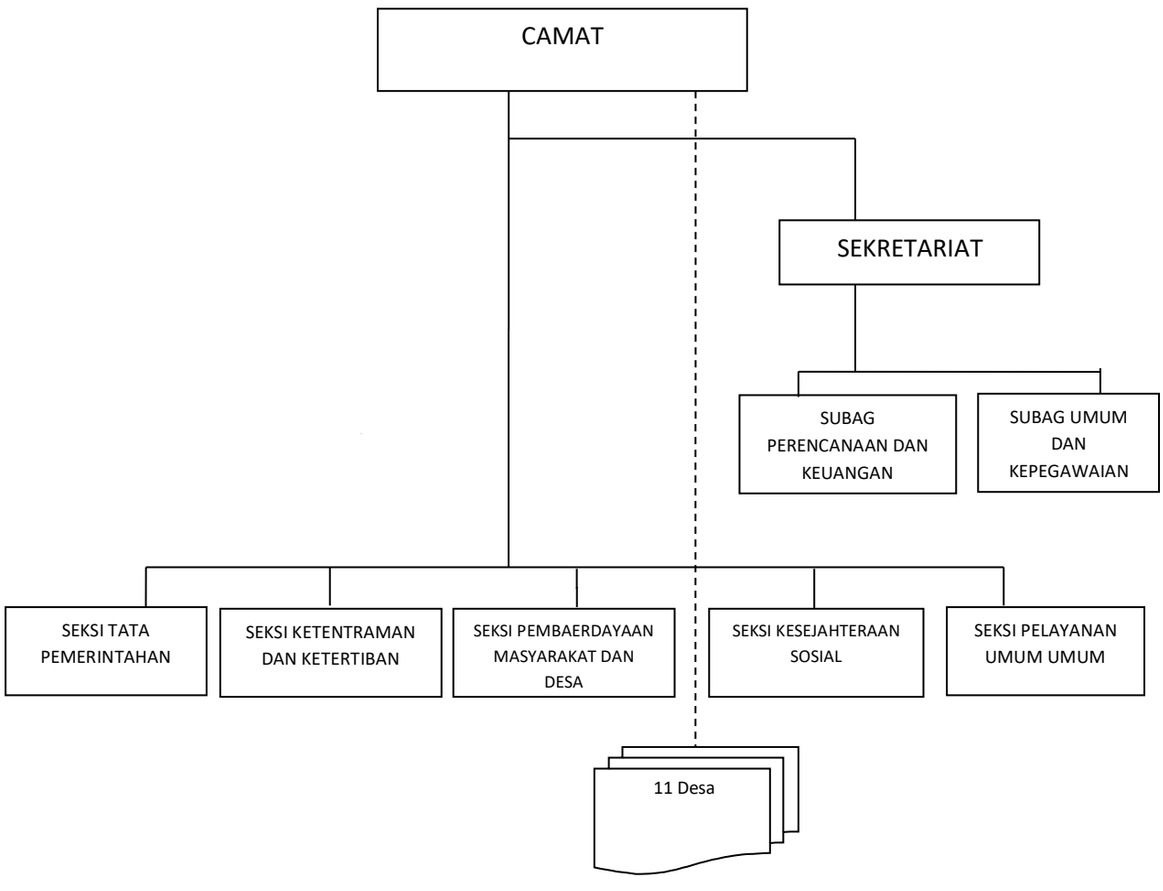

F. KEPEGAWAIAN

Data Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas pada Kantor Kecamatan JumantonoTahun 2022 Berjumlah 32 orang. Dengan perincian sebagai berikut :

1. DAFTAR PEGAWAI SKPD/OPD

NO	NAMA PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	Sugiharjo,S.IP.,M.M. NIP: 19711108 199203 1 005	Pembina Tk.I (IV/b)	Camat Jumantono
2	Suwardoyo,S.H. NIP:196905 198803 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Seketaris Camat
3	Eryca Murwidyawan,S.S.T.P.,M.Si. NIP:19900524 201010 1 003	Penata (III/c)	Kasi Tata Pemerintahan
4	Heri Purnomo, S.E.,M.M. NIP.19750508 200501 1 014	Pembina (IV/a)	Kasi Pelayanan Umum
5	Erwin Prilasiani,S.H. NIP.197303326 199703 2 010	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Kesos
6	Lasmiati Yuli Hartati,S.H.,M.M. NIP.19770707 200604 2 058	Pembina (IV/a)	Kasi PMD
7	Wahyu Wibowo, S.S.T.P. NIP.19911116 201406 1 002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasi Trantib
8	Mariyo,S.Sos. NIP.19670130 200701 1 008	Penata Muda (III/a)	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
9	Suharni NIP.19641231 198903 2 058	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
10	Dody Marsetio,S.E. NIP.19701030 198911 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Pengelola Data Trantib
11	Suparni NIP.19760225 199603 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengola Adminitrasi Pemerintahan
12	Ngadi NIP.19680404 200701 1 058	Penatur Tk.I(II/d)	Pengadministrasi Umum & Kepegawaian
13	Suharto, S.E. NIP.19680623 200701 1 025	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengelola Pelayanan Umum
14	Eni Purwanti NIP.19760302 199803 2 005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendara Perencanaan & Keuangan
15	Agus Wahyu Prasetyo, S.Sos. NIP. -	-	Tenaga Administrasi
16	Paryadi, S.Pd. NIP. -	-	Tenaga Administrasi
17	Dyah Perwitasari, A.Md. NIP. -	-	Tenaga Administrasi

18	Eni Wulandari, S.Pd. NIP. -	-	Tenaga Administrasi
19	Roni Prasetyo NIP. -	-	Tenaga Administrasi
20	Ryan Setiadi, A.Md. NIP. -	-	Tenaga Administrasi
21	Ferdy Hartanto NIP. -	-	Tenaga Administrasi
22	Novia Dian Andarwati NIP. -	-	Tenaga Administrasi
23	Arga Satria Putra NIP. -	-	Tenaga Administrasi
24	Widhi Mulia Sunaryati, S.Kom. NIP. -	-	Tenaga Administrasi
25	Ari Kurniawan NIP. -	-	Tenaga Administrasi
26	Rudiyanto NIP. -	-	Tenaga Administrasi
27	Wahyuni NIP. -	-	Tenaga Administrasi
28	Adhitya Wahyu Pradana NIP. -	-	Tenaga Administrasi
29	Artha Sari Christin Sihaloho, S.H. NIP. -	-	Tenaga Administrasi
30	I Dewa Nyoman Gelgel I, S.Pd. NIP. -	-	Tenaga Administrasi
31	Musafi'ah Purwati, S.H. NIP. -	-	Tenaga Administrasi
32	Afrisna Nur Adillah, A.Md. NIP. -	-	Tenaga Administrasi

2. DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL SKPD/OPD YANG TERISI

NO	NAMA PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	Sugiharjo,S.IP,M.M. NIP: 19711108 199203 1 005	Pembina Tk.I (IV/b)	Camat Jumantono
2	Suwardoyo,S.H. NIP:19690526 198803 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Seketaris Camat
3	Eryca Murwidyawan,S.S.T.P.,M.Si. NIP:19671223 199401 1 002	Penata (III/c)	Kasi Tata Pemerintahan

4	Heri Purnomo, S.E.,M.M. NIP.19750508 200501 1 014	Pembina (IV/a)	Kasi Pelayanan Umum
5	Erwin Prilasiani,S.H. NIP.19630105 199303 1 006	Penata (III/c)	Kasi Kesos
6	Lasmiati Yuli Hartati,S.H,M.M. NIP.19660613 198603 2 004	Penata Tk.I (III/d)	Kasi PMD
7	Wahyu Wibowo, S.S.T.P. NIP.19911116 201406 1 002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasi Trantib
8	Mariyo,S.Sos. NIP.19670130 200701 1 008	Penata Muda (III/a)	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
9	Suharni NIP.19641231 198903 2 058	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

3. DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL SKPD/OPD YANG BELUM TERISI

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
1.	NIHIL	

4. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL UMUM SKPD/OPD

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	N I H I L	

5. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL UMUM SKPD YANG BELUM TERISI

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
	N I H I L	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 1.834.100,00 Realisasi: Rp. 1.834.100,00 Persentase: (100,00%)	Tersedia dokumen Renja, RKA, DPA 3 Dokumen	3 Dokumen (100.00%)		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 2.057.000,00 Realisasi: Rp. 2.057.000,00 Persentase: (100,00%)	Prosentase tertib laporan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 %	100 % (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 1.867.054.324,00	Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun	1 Tahun (100.00%)		

			DAERAH, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Realisasi: Rp. 1.575.922.280,00 Persentase: (84,41%)				
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Anggaran: Rp. 7.750.000,00 Realisasi: Rp. 7.750.000,00 Persentase: (100,00%)	Pakaian kemeja batik 31 Buah	31 Buah (100.00%)		
				2)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Anggaran: Rp. 35.100.000,00 Realisasi: Rp. 34.938.000,00 Persentase: (99,54%)	Peningkatan kinerja pegawai 1 Kegiatan	1 Kegiatan (100.00%)		
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 6.817.128,00 Realisasi: Rp. 6.817.128,00 Persentase: (100,00%)	Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 6.911.700,00 Realisasi: Rp. 6.911.700,00 Persentase: (100,00%)	Penyediaan bahan logistik kantor 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran: Rp. 6.480.000,00 Realisasi: Rp. 6.480.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianaya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 3.840.000,00 Realisasi: Rp. 3.840.000,00 Persentase: (100,00%)	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 43.160.800,00 Realisasi: Rp. 42.375.660,00 Persentase: (98,18%)	Terselenggarana rapat-rapat koordonasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1 Tahun	1 Tahun (100.00%)		

			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Mebel Anggaran: Rp. 6.600.000,00 Realisasi: Rp. 6.600.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya meja rapat 2 buah	2 buah (100.00%)		
				2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 14.515.000,00 Realisasi: Rp. 14.515.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya laptop, PC 2 unit	2 unit (100.00%)		
				3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 99.600.000,00 Persentase: (99,60%)	Penataan halaman kantor 1 Paket	1 Paket (100.00%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH,	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 500.000,00 Realisasi:	Tersedianya blangko dispensasi surat 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 500.000,00 Persentase: (100,00%)				
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 31.200.000,00 Realisasi: Rp. 26.856.399,00 Persentase: (86,08%)	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 88.645.948,00 Realisasi: Rp. 88.645.948,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya jasa THL, petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kurir surat, petugas administrasi 5 Orang	5 Orang (100.00%)		
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 23.408.000,00 Realisasi: Rp. 22.479.500,00 Persentase:	Cakupan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan 4 Unit	4 Unit (100.00%)		

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		(96,03%)				
				2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 12.560.000,00 Realisasi: Rp. 12.560.000,00 Persentase: (100,00%)	Cakupan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 12 Unit	12 Unit (100.00%)		
				3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 13.933.000,00 Realisasi: Rp. 13.925.124,00 Persentase: (99,94%)	Terlaksananya pemeliharaan pagar kantor 1 Unit	1 Unit (100.00%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN		a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Anggaran: Rp. 2.867.400,00 Realisasi: Rp. 2.867.400,00 Persentase: (100,00%)	Dokumen kepuasan survey masyarakat 1 Kegiatan	1 Kegiatan (100.00%)		
			b. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyel	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Anggaran: Rp. 275.576.100,00 Realisasi: Rp. 275.376.100,00	Pembinan Linmas/ Kamtibmas 11 Desa	11 Desa (100.00%)		

			enggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase: (99,93%)				
			c. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Anggaran: Rp. 18.975.000,00 Realisasi: Rp. 18.975.000,00 Persentase: (100,00%)	Biaya operasional kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 100 %	100 % (100.00%)		
				2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional Anggaran: Rp. 67.738.100,00 Realisasi: Rp. 67.695.600,00 Persentase: (99,94%)	Terselenggaranya kegiatan FKUB 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

			d. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Anggaran: Rp. 9.976.700,00 Realisasi: Rp. 9.976.700,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya pembinaan administrasi tata pemerintahan desa 11 Desa	11 Desa (100.00%)		
				2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 9.127.000,00 Realisasi: Rp. 9.127.000,00 Persentase: (100,00%)	Pembinaan Administrasi Desa 11 Desa	11 Desa (100.00%)		
				3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa Anggaran: Rp. 8.335.400,00 Realisasi: Rp. 8.279.400,00 Persentase: (99,33%)	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan 11 Desa	11 Desa (100.00%)		

				4)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa Anggaran: Rp. 6.031.300,00 Realisasi: Rp. 6.031.300,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya musrenbang kecamatan dan desa 11 Desa	11 Desa (100.00%)		

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

NO	Kementerian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

NO	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

NO	Kabupaten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

BAB VI

PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kecamatan Jumantono adalah tidak ada / Nihil.

BAB VIII
PENUTUP

Selama Tahun Anggaran 2022 secara umum program – program yang telah direncanakan di Kecamatan Jumantono telah dilaksanakan sesuai rencana dan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap sasaran strategik dan kegiatan-kegiatan utama pendukung pencapaian sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa Cukup berhasil. Dengan keberhasilan ini berarti sebagian besar sasaran telah dapat tercapai, namun didalamnya masih ada beberapa sasaran yang belum dapat berhasil optimal antara lain yang berkaitan dengn Peningkatan Sumber Daya Manusia. Tidak optimalnya Pencapaian sasaran ini disebabkan oleh beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi secara umum adalah bahwa Peningkatan Kualitas SDM sering dihadapkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung budaya kerja yang baik. Disamping itu kendala pendidikan rata-rata perangkat Desa kurang mendukung bagi peningkatan profesionalisme. Oleh karena itu perubahan tidak dapat dicapai secara instan melainkan harus melalui proses panjang dengan beberapa langkah pembinaan yang berkelanjutan.

Dari segi Anggaran secara umum dapat berjalan, tetapi akan lebih efektif jika anggaran untuk unit kerja Pemerintah Kecamatan benar-benar mengacu pada sistim anggaran kinerja sepenuhnya, dan bukan sekedar penyeragaman anggaran kecamatan dalam satu kabupaten karena kebutuhan anggaran masing-masing kecamatan pasti berbeda disesuaikan dengan wilayahnya.

Dalam Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Jumantono telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar. Dan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 12 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Demikian laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jumantono semoga dengan adanya Laporan ini dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan Kecamatan Jumantono selama Tahun 2022. Kami menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih banyak kekurangan, kami mohon saran, petunjuk guna perbaikan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Jumantono, 16 Januari 2023

CAMAT JUMANTONO

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMANTONO

SUGIHARJO,S.IP,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19711108 199203 1 005